

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit Tipiter II melakukan penegakan hukum dengan melakukan pencegahan hukum dengan melakukan pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang.
2. Hambatan yang dialami Polresta Padang terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Yang pertama, sarana dan fasilitas, kedua, masyarakat, ketiga, lokasi transportasi bahan bakar minyak subsidi ini berubah-ubah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Agar di wilayah Kota Padang kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi harus ditangani secara serius. Kepolisian harus memperhatikan pelaku masyarakat untuk mencegah kejahatan berikutnya.
2. Agar untuk mengatasi hambatan diperlukan peningkatan hukum yang berwenang dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam untuk mengatasi hambatan penegakan hukum mengenai penyalahgunaan pengangkutan BBm bersubsidi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Amaruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Duwi Hankodo, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Teuku Hasan, 1985, *Sejarah Minyak Dan Gas Bumi*, Yayasan Sari Pinang, Jakarta.
- Maeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter M Blau, 2001, *Birokrasi Masyarakat Modern*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pujiyono Ade Adhari, 2019, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish (Grub Penerbitan CV Budi Pertama), Yogyakarta.
- Rudi Simamora, 2000, *Hukum tentang Minyak Dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Anggota IKAPI UII Press, Yogyakarta.
- RE. Baringbing, 2011, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poloteia, Bogor.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soebroto Brotodirejo, 1989, *Kepolisian Sebagai Penegakan Hukum*, Sespimpol, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sadjijono, 2005, *Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Peraturan*, Laksbang, Yogyakarta.

W.J.S Poerwadarminta, 1989, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

## **C. Sumber Lainnya**

Ida Bagus Kadek Danendra, "Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen* Vol. 1 No.4

Polresta Padang, <https://humas.polri.go.id/2024/01/23/unit-ii-tipidter-satreskrim-polresta-padang-ungkaptindak-pidana-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi>, 29 Juli 2024, 15:32 WIB.

Dit Reskrimus Polda Sumbar , <https://krimsuspoldasumbar.wor dpres s.com/s ubdit- iv-tipiter/>, 29 Juli 2024, 17:05 WIB

Aipda Rintone, Wawancara Kepolisian Unit Tipiter II Polresta Padang, 26 Juli 2024, 14:15 WIB.